

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Penerbit Rajawali Pers.
- Berge J.B.J.M Ten & Spelt N.M. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rhiti, H. (2005). *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saleh, R, (1980), *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian dasar dalam hukum pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Samekto, F. A. (2003). *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher.
- W.F Prins, Kosim Adisapoetra. (1983). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijayanto Roni, (2012) *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.
- Yudelmi, & Idra, M. C. (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Hal. 188-189.

JURNAL

- Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*.
- Al'afghani, M. M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique To Its Adoption in the Job. *Jurnal Konstitusi*, 18, 68.
- Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really responsive risk-based regulation. *Law & policy*, 32(2), 181-213.'
- Darongke, B. B., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2021). Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. *Amanna Gappa*, hal. 61-69.
- Dewi, D. K., Arifin, S., & Tarigan, P. (2004). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU Law Journal*, 2(1), 124-138.
- Fariyah, L., Femi Anggraeni. (2012). Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(3):241.

- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pembedaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716-1734.
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 871-891.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Indonesia Berdaya*, 3(4), hal. 977-986.
- Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264., hal. 252.
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), hal. 154-165.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.
- Mallombasang, S. (2015). Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. *Humanis*, 19.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2021). Problem Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Pasca Reformasi. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), hal. 92-73.
- No. J. S. J. (2022). Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 19, 33-47.

- Nur, M. I., Fraiskam, N., & Pangaribuan, R. F. (2021). Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Oktaviani, Y. W. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*. Samarinda: Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Patoding, M. M. (2021). PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN Oleh: Marcelino Mandae Patoding. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3).
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.
- Rawung, J. E. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 2(5).
- Rechtschaffen, C. L., Gauna, E., & O'Neill, C. (2009). Environmental justice: Law, policy & regulation.
- Rozi, F. (2018). Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 34-54.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sayori, W. E. (2017). *Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pt Kahatex Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

- Sembiring, R., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., & Fajrini, R. (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jakarta: ICEL*.
- Sinaga, Edward James. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3):329.
- Sulaeman, B., Mina, R., & Fality, F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), hal. 160-184.
- Suprijadi, D. A. P. (2019). Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Derah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), hal. 98-115.
- Wibisono, Andri Gunawan. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2):222.
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remidium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hal. 1-24.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*. (pp. 1-24).

Yulawati, I., & Masyar, A. ASPEK PIDANA DAN HUKUM LINGKUNGAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

Zulfadli, M dkk. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

INTERNET

<https://bisnis.tempo.co/read/1680747/apa-itu-smelter-begini-rincian-dan-fungsinya-dalam-penambangan>

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

<https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/#tafsir-lengkap-kemenag>.

https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/bimbingan_teknis_dan_sosialisasi_imple
[mentasi_perizinan_berusaha_berbasis_risiko_bagi_pelaku_usaha](https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/bimbingan_teknis_dan_sosialisasi_imple)

<https://www.bappenas.go.id/id/berita/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100->

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>